



DPDPK Antisipasi SPPT PBB Salah Alamat

● Alokasikan Rp 2,6 M untuk Pendataan Ulang Wajib Pajak di 10 Kecamatan

YOGYA, TRIBUN - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang seringkali salah alamat diharapkan tak lagi terjadi. Harapan ini terjadi setelah nantinya Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

(DPDPK) Kota Yogyakarta melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak (WP) PBB.

Sebagaimana diketahui, se-

ringkali SPPT PBB dialamatkan kepada orang yang sudah meninggal, sementara sertifikat dari tanah yang harus dibayar pajaknya sudah berpindah tangan ke anak cucu atau bahkan telah terjadi jual beli terha-

dap objek pajak tersebut.

Kepala DPDPK Kota Yogya, Kadu Renggono menjelaskan, pendataan WP PBB ini dilakukan di 10 Keca-

● ke halaman 1

DPDPK Antisipasi SPPT PBB

● Sambungan Hal 13

matan di Kota Yogyakarta. Pendataan WP ini meneruskan empat kecamatan yang telah selesai didata.

"Ini untuk meneruskan program pendataan yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2015 lalu, data wajib pajak PBB yang ada di Kota Yogyakarta, sementara 10 kecamatan telah rampung didata," ujar Kadri Renggono.

Sebanyak sepuluh kecamatan yang telah didata

ulang WP PBB yakni Kecamatan Mantriweron, Kraton, Mergangsan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Umbulharjo, Kotagede, Pakualaman dan Gondomanan.

63.000 WP

Sementara untuk jumlah wajib pajak yang telah didata adalah sebanyak 63 ribu wajib pajak. Setiap pendataan satu wajib pajak mengeluarkan dana Rp 35 ribu sehingga di jumlahkan dana kurang lebih mencapai Rp 2,6 miliar.

"Pihak ketiga dari profesional juga dilibatkan dalam proses pendataan, petugas tersebut langsung menda-

tangi satu per satu wajib pajak PBB untuk melakukan verifikasi ulang atas wajib pajak," tutur Kadri.

Tambah Kadri, petugas seringkali kesulitan dalam bertemu dengan WP, pasalnya tidak ada di rumah, atau sedang berdomisili di daerah lain.

"Petugas hanya bertemu dengan anggota keluarga yang terkadang tidak tahu menahu mengenai pajak bumi dan bangunan. Ini menyulitkan petugas jika ada objek pajak yang berubah," ujarnya.

Berdasarkan pendataan DPDPK Kota Yogyakarta pada tahun 2015 lalu di em-

pat kecamatan, tercatat sebanyak 26 ribu WP. Namun tidak ada perubahan signifikan dari jumlah WP, sedangkan dari sisi peruntukan, WP banyak mengalami perubahan baik luasan bumi ataupun bentuk bangunan.

Hasil pendataan WP yang telah valid nantinya akan dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk ditagih pada tahun 2016 ini.

"Kami berharap pendataan di sepuluh kecamatan dalam waktu dekat ini, dapat segera selesai, supaya SPPT bisa kami distribusikan lebih cepat. Maret paling cepat," pungkas Kadri. (rik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005